

## TINDAK PIDANA PERDAGANGAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA LINTAS NEGARA

Oleh

Poernomowati

Fakultas Hukum UNIKAR Surabaya

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan peredaran dan pemakaian Psikotropika dan obat terlarang sejenis telah merambah kalangan pemuda dan orang dewasa, baik orang kelas bawah maupun menengah keatas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti permasalahan dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang ada.

Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan (wawancara langsung) dan studi kepustakaan.

Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif dengan menggunakan pendekatan pemikiran deduktif kualitatif dan komperatif. Teknik analisa kualitatif dengan pendekatan pemikiran deduktif logik digunakan jika masalah yang dihadapi menghendaki penjelasan. Sedangkan untuk pendekatan komperatif digunakan jika masalah yang dihadapi menghendaki perbandingan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan Hukum Nasional sesungguhnya merupakan pencerminan dari budaya suatu bangsa. Sehingga sering dikemukakan pendapat bahwa Hukum Nasional suatu bangsa dari satu negara kepada negara lain memiliki karakteristik sendiri dan khas, berbeda-beda satu sama lain

*Kata kunci : narkotika dan psikotropika*

### PENDAHULUAN

Konvensi internasional tertua dan sebagai pelopor dalam perkembangan pengaturan narkotika secara internasional di kemudian hari, adalah konvensi candu tahun 1912 atau dikenal sebagai "The Hague Convention". Sejak saat itu, muncullah beberapa konvensi lain yang mengatur tentang narkotika : Konvensi Jenewa tahun 1925 atau "The International Opium Convention of 1925"; "The 1936 Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs"; "The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961"; "The Psychotropic Substances Convention, 1971"; "Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Selain konvensi-konvensi tersebut diatas, juga telah ditetapkan beberapa protokol yang mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam

konvensikonvensi tersebut di atas. Protokol-protokol tersebut antara lain adalah, protokol tahun 1946, 1948, 1953 dan terakhir protokol 1972 yang merubah ketentuan yang diatur di dalam Konvensi Tunggal Narkotika atau "The Single Convention on Narcotics Drugs", 1961 (Chatterjee, 1981).

Perkembangan dari satu konvensi internasional narkotika kepada konvensi internasional narkotika lainnya mengandung implikasi perubahan/perbedaan tujuan dan lingkup kendali dan sekaligus juga merupakan kelengkapan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Sebagai contoh, Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, bertujuan antara lain untuk meng-kodifikasi-ketentuan-ketentuan tentang narkotika yang tersebar sejak konvensi Candu Tahun 1912 (sembilan konvensi dan protokol) dan mempermudah mekanisme, pengawasan secara internasional terhadap candu dan ganja. Lingkup kendali Konvensi Tunggal,

1961 tersebut adalah, memasukkan obat-obatan tersebar sejak konvensi candu 1912 kedalam pengawasan internasional; melakukan perubahan penempatan bahan-bahan dimaksud dari satu "schedule" kepada "schedule" yang lain, menunda pemasukkan bahan-bahan obat-obatan kedalam salah satu "schedule" yang telah ditetapkan, dan membebaskan bahan-bahan obat tertentu dari penempatannya dalam salah satu "schedule". Indonesia merupakan salah satu peserta dan penanda-tangan (dari 73 peserta) dalam Konvensi tersebut.

Penegakan dalam konvensi adaiah terletak pada pengertian "*suppression*" yang memiliki makna ganda, yakni : pertama, dalam arti metoda positif, suatu metoda langsung yang membantu menekan lalu-lintas perdagangan gelap narkotika seperti : pembentukan peraturan perundang-undangan; kerja-sama, koordinasi dan manajemen yang efisien. Sedangkan makna kedua, yaitu dalam arti metoda negatif terdiri dari pemidanaan dan pengendalian / pengawasan (Chatterjee, 1981).

Konvensi Narkotika 1988 berbeda dengan dua konvensi terdahulu adalah merupakan konvensi yang mengatur tentang penegakkan hukum (law enforcement) di dalam mencegah dan memberantas lalu lintas perdagangan gelap narkotika dan bahan-bahan psikotropika. Ciri khas konvensi tersebut nampak dari kekhususannya yang mencakup ketentuan mengenai : pertama, penegakan dan perluasan lingkup kendali yang dititik-beratkan pada "*illicit-trafficking by sea*" (artikel 17). Kedua, penegakan mengenai yurisdiksi yang diperluas (artikel 4 ); ketiga, perihal ekstradisi (artikel 6); keempat, perihal pensitaan atau confiscation; dan kelima, perihal Mutual legal assistance.

Kejahatan narkotika (dan bahan psikotropika) dalam segala bentuknya termasuk lalu lintas perdagangan gelap merupakan salah satu kejahatan internasional atau "*international crimes*", dan karenanya bukan hanya merupakan masalah nasional negara-negara yang bersangkutan.

Perkembangan kejahatan-kejahatan internasional dimaksud sudah diantisipasi dan diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa di dalam Kongres PBB tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders", 1990 di Havana, Cuba.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di dalam Kongres PBB tersebut diatas, ada tiga hal yang menarik perhatian untuk dikemukakan, yaitu pertama, bahwa kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan dipandang membahayakan umat manusia dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan merupakan masalah baru yang dihadapi seluruh bangsa-bangsa, selain kejahatan yang ada dan bersifat nasional. Untuk menanggulangi kejahatan internasional tersebut mutlak diperlukan kerja sama bilateral dan atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Kedua, bahwa

perkembangan perubahan hukum nasional di dalam hal yang menyangkut kejahatan-kejahatan internasional terdapat 22 jenis kejahatan internasional (Bassiouni, 1966) akan sangat tergantung dari dan dipengaruhi oleh perkembangan konvensi-konvensi internasional di bidang kejahatan dimaksud. Ketiga, dampak perkembangan kejahatan internasional dates telah mendorong perkembangan cabang ilmu hukum baru, yaitu: *hukum pidana internasional*, yang merupakan hasil perpaduan antara dua disiplin hukum yang berbeda namun berkembang sejalan dan saling melengkapi: aspek hukum pidana (nasional) dari hukum internasional dan aspek internasional dari hukum (pidana) nasional (Bassiouni, 1986).

Berdasarkan hasil studi kasus tindak pidana narkotika (TPN) di Indonesia dari tahun 1985 - 1991, telah diketemukan bukti bahwa tindak pidana ini banyak dilakukan oleh warga negara asing disamping oleh warga negara Indonesia sendiri. Dari kasus-kasus TPN yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI, ternyata 21 kasus diantaranya melibatkan WNA sebagai pelakunya. Dan 21 kasus tersebut, tercatat : 1 orang warga negara Amerika, 3

orang warga negara Australia, 3 orang warga negara Inggris, 4 orang warga negara Jerman, 2 orang warga negara Swiss, dan 1 orang masing-masing warga negara Jepang, Malaysia, Belanda, Thailand, Austria, Italia, Perancis dan warga negara Yunani (Romli et.al, 1992) Data tentang TPN di kedua negara tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa modus operandi TPN tidaklah memandang status kewarga-negaraan pelaku dan selaku tidak terbatas pada teritorial negara tertentu, melainkan bersifat lintas teritorial negara-negara terkait. Dalam konteks perkembangan hukum pidana nasional yang akan datang sepatutnya sejak awal telah diantisipasi sifat dan karakteristik serta modus operandi TPN tersebut. Bahkan untuk sementara dapat ditarik kesimpulan bahwa, nampaknya aplikasi asas teritorial sebagai salah satu asas berlakunya hukum pidana yang sekarang dianut, *tidak lagi dapat diperlakukan secara absolute*.

Indonesia, walaupun belum menandatangani konvensi narkoba 1968, sebagai salah satu negara transit wajib mengantisipasi perkembangan lalu-lintas perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika. Dalam konteks masalah yurisdiksi teritorial ini, salah satu upaya antisipasi dimaksud adalah mempertanyakan sejauh manakah kondisi objektif porangkat peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia dapat mengadaptasi ketentuan-ketentuan Konvensi Narkoba 1998. Dalam mengatasi permasalahan perdagangan gelap obat narkoba dan bahan psikotropika lintas Negara.

#### METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan peredaran dan pemakaian Psikotropika dan obat terlarang sejenis telah merambah kalangan pemuda dan orang dewasa, baik orang kelas bawah maupun menengah keatas, sehingga perlu

penanganan serius semua lapisan masyarakat dan pemerintah secara nasional

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti permasalahan lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang ada.

Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan (wawancara langsung) dan studi kepustakaan.

Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif dengan menggunakan pendekatan pemikiran deduktif kualitatif dan komperatif. Teknik analisa kualitatif dengan pendekatan pemikiran deduktif logik digunakan jika masalah yang dihadapi menghendaki penjelasan. Sedangkan untuk pendekatan komperatif digunakan jika masalah yang dihadapi menghendaki perbandingan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Pengertian narkoba, narkotika dan psikotropika pengertian narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain dan obat-obatan berbahaya yang sangat berguna dan diperlukan untuk kepentingan dunia kedokteran sebagai pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun disisi lain narkoba sangat membahayakan, sehingga penggunaannya perlu pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat yang dalam hal ini diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Obat-obatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat-obatan yang diperlukan untuk dunia kedokteran dengan tujuan kesehatan manusia. Obat-obatan pada dasarnya adalah racun yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dosis ataupun tujuan yang salah akan mengakibatkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental bagi penggunaannya.

Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini telah demikian meningkatnya baik dalam jumlah, sebaran maupun tingkatan social penggunaannya, oleh karena masalah ini demikian luas demikian berbahayanya bagi kelangsungan serta kelanggengan kesejahteraan masyarakat, maka usaha-usaha pencegahan, pengendalian pengawasan serta pemberantasannya tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan saja tetapi berlebih-lebih merupakan tanggung jawab kita semua masyarakat bangsa Indonesia tercinta ini. Siapa lagi yang akan peduli akan keselamatan generasi kita, bangsa kita kalau bukan kita sendiri.

### **Jenis-jenis narkoba**

#### **1. Narkotika**

Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintesis semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sesuai dengan UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Narkotika ada tiga macam golongan berdasarkan tinggi rendahnya potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan, meliputi :

##### **1).Narkotika Golongan I**

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dapat mengakibatkan ketergantungan.

##### **2).Narkotika Golongan II**

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

##### **3).Narkotika Golongan III**

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

#### **2. Psikotropika**

Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas, mental dan perilaku.

Sesuai dengan U.U.R.I. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ada 4 (empat) golongan berdasarkan tinggi dan rendahnya potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan meliputi :

##### **a. Psikotropika Golongan I**

Adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat kuat dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

##### **b. Psikotropika Golongan II**

Adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

##### **c. Psikotropika Golongan III**

Adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang yang dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Termasuk golongan ini antara lain : Amobarbital, Flunitrazepam, Kastina dan lain-lain.

##### **d. Psikotropika Golongan IV**

Adalah psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Termasuk golongan ini antara lain : Barbitol, Bromasepam, Diazepam,

Estazolam, Fenorbital, Klobazam, Klorazepam dan lain-lain.

**Zat Adiktif dan obat-obat berbahaya**

Adalah bahan lain dan obat bukan narkotik atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.

**a. Minuman beralkohol**

Sesuai dengan keputusan Presiden R.I. No. 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi dan fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilarang pada tempat-tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan untuk daerah khusus oleh Gubernur.

Tempat tertentu lain yang dimaksud dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu yang ditentukan Bupati/Walikota/Gubernur.

**b. Tembakau (tobacco)**

Zat ini merupakan suatu substansi yang dapat mengakibatkan suatu kondisi ketergantungan. Berhubungan luasnya penggunaan tembakau (dalam bentuk rokok) dewasa ini, maka tembakau sebagai suatu substansi yang dapat menimbulkan suatu masalah kesehatan masyarakat. Walaupun demikian, substansi ini sedikit pengaruhnya di bidang perangsangan atau depresiasi dari sistem syaraf sentral atau gangguan dalam persepsi, alam perasaan, proses fikir, tingkah laku atau fungsi motorik. Karena dalam perbandingan dengan substansi lain, pengaruh buruknya relatif kurang dan akibatnya hanya dapat dilihat apabila

digunakan dalam jumlah besar dan waktu yang lama, maka walaupun substansi ini merupakan suatu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan pada umumnya hanya sedikit perhatian yang tertera pada tembakau.

**c. Obat-obat berbahaya**

Obat-obat berbahaya adalah obat yang memiliki kemampuan untuk mengakibatkan kondisi ketergantungan pada organisme hidup baik mental maupun fisik atau keduanya..

**Pengaruh narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba**

**a. Deprensat.**

Yaitu mengendorkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk memenangkan syaraf seseorang agar dapat tertidur.

**b. Simultan**

Yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.

**c. Halusinogen**

Yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

**Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kondisi fisik akibat zat itu sendiri**

Termasuk di sini gangguan mental organik zat, misalnya intoksikasi yaitu suatu perubahan mental yang terjadi karena dosis berlebihan yang memang diharapkan oleh pemakainya. Sebaliknya bila pemakainya terputus akan terjadi gejala-gejala putus zat. Berbagai zat akan menimbulkan komplikasi sendiri-sendiri :

**Opiodia**

Acapkali menimbulkan gangguan mentruasi, impotensi dan konstipasi kronis.

**Ganja**

Pemakaian lama menurunkan daya tahan sehingga mudah terserang infeksi. Ganja juga memperburuk aliran darah koroner.

**Kokain**

Bisa terjadi aritma jantung, ulkus atau perforasi sekat hidung jangka

panjang terjadi anemia dan turunnya berat badan.

#### **Alkohol**

Menimbulkan banyak komplikasi antara lain gangguan lambang, kanker usus, gangguan lever, gangguan metabolisme, cacat janin dan gangguan seksual.

#### **Halusinogen**

Dapat menimbulkan pendarahan otak

#### **Inhalansia**

Menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal, lever, jantung dan otak.

### **1) Terhadap kehidupan mental emosional dan perilaku**

Intoksikasi alkohol atau Sadetiva Hipnotik menimbulkan perubahan pada kehidupan mental emosional yang bermanifestasi pada gangguan perilaku yang tidak wajar.

Pemakaian ganja yang berat dan lama menimbulkan sindrom amotifasional. Putus obat golongan amphetamine dapat menimbulkan depresi sampai bunuh diri. Akibat terhadap fungsi mental antara lain berupa gangguan persepsi, daya pikir, kreasi dan emosi yang dapat merubah perilaku menjadi menyimpang. Zat adiktif (antara lain nikotin dalam rokok dan etanol dalam minuman keras). Dapat menimbulkan intoksikasi, adiksi atau ketergantungan fisik dan mental yang menimbulkan hambatan atau ketidakmampuan untuk hidup secara wajar.

### **2) Terhadap kehidupan sosial.**

Gangguan mental emosional pada penyalahgunaan obat akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, bekerja atau sekolah. Pada umumnya prestasi akan menurun, lalu dipecat/dikeluarkan yang berakibat makin kuatnya dorongan untuk menyalahgunakan obat. Dalam posisi demikian hubungan dengan anggota keluarga dan kawan pada umumnya terganggu.

Pemakaian yang lama akan menimbulkan toleransi, kebutuhan zat bertambah. Akibat selanjutnya akan memungkinkan terjadinya tindak kriminal, keretakan rumah tangga sampai perceraian.

Semua pelanggaran, baik norma sosial maupun hukum terjadi karena kebutuhan akan zat yang mendesak, dan pada keadaan intoksikasi yang bersangkutan bersifat agresif dan impulsif.

#### **Tentang yurisdiksi**

#### **Masalah yurisdiksi dalam hukum nasional dan hukum internasional**

Merupakan masalah yang bersifat kontroversial. Di satu sisi semua negara-negara di dunia mengakui eksistensi kedaulatan negara dan inherant didalamnya masalah yurisdiksi negara ybs. Yurisdiksi suatu negara adalah sebatas teritorial negara yang bersangkutan. Namun di sisi lain kita telah menyaksikan betapa eksistensi yurisdiksi suatu negara telah melanggar kedaulatan negara lain, oleh terutama, negara-negara yang menamakan dirinya "superpower" atau "adidaya". Beberapa kasus pelanggaran kedaulatan negara dalam konteks masalah pemberantasan narkotika antara lain telah dilakukan oleh Pemerintah Amerika dalam hal ini Drug Enforcement Agency (DEA) terhadap Jenderal Noriega (Panama). Terlepas dari kebenaran alasan "penculikan", "penangkapan", "penahanan" dan "peradilan", serta keabsahannya, jelas tindakan (DEA) tersebut oleh hampir semua negara diakui sebagai tindak pelanggaran terhadap kedaulatan negara Panama.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, kiranya perlu ditarik pengalaman yang berharga bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan memiliki arti strategis sebagai "transit state" (laporan sidang Komisi Narkotika PBB, 1992), dalam jalur lalu-lintas perdagangan gelap narkotika dan bahan-bahan psikotropika. Perhatian dan upaya-upaya pemerintah kita untuk menanggulangi masalah narkotika merupakan salah satu perhatian dan upaya-upaya di samping upaya lainnya yang bersifat nasional lainnya seperti masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial pada umumnya dan masalah kependudukan. Kiranya patut dipahami bahwa, penanggulangan lalu lintas perdagangan narkotika dan bahan-bahan psikotropika oleh

Pemerintah RI masih dihadapan kepada banyak kendala-kendala, baik yang merupakan kendala di bidang penegakkan hukum maupun kendala di bidang infrastruktur maupun suprastruktur.

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari laut dengan luas kurang lebih 3 juta Km. Berdasarkan Wawasan Nusantara, konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan, adalah merupakan penjelmaan dari satu kesatuan geografi yang menjadi dasar kesatuan politik, ekonomi, sosial kebudayaan dan hankam (Mochtar Kusumaatmadia, 1978). Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan lalu-lintas perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika inilah maka masalah yurisdiksi di laut merupakan masalah yang sangat penting; bahkan kiranya perlu menjadi prioritas utama Pemerintah RI. Namun demikian di lain pihak keluasan wilayah RI sebagai negara Nusantara belum didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan pidana yang lengkap di dalam rangka menanggulangi masalah lalu-lintas perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika yang akan penulis uraikan pada penelitian ini.

#### Perihal yurisdiksi terhadap lalu-lintas perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika

##### Artikel 4 butir 1 Konvensi Narkoba 1988 menegaskan,

"Each Party (a) Shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offence it has established in accordance with article 3 paragraph 1, when :

- (1) The offence is committed in its territory
- (2) The offence is committed on board a vessel flying its flag or an aircraft which is registered under its laws at the time the offence is committed.
- (b) May take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when :

- (1) The offence is committed by one of its nationals or by person who has his habitual residence in its territory ;
- (2) The offence is committed on board a vessel concerning which that Party has been authorized to take appropriate action pursuant to article 17, provided that such jurisdiction shall be exercised only on the basis of agreements referred to in paragraph 4 and 9 of that article 1 ;
- (3) The offence is one of those established in accordance with article 3, paragraph 1, subparagraph (c) (iv), and is committed *outside its territory with a view to the commission, within its territory*, of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1.

Dari substansi artikel 4 tersebut diatas, penulis meminta perhatian pada butir b (3). Ketentuan butir b (3) telah menegaskan bahwa negara peserta konvensi dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam artikel 3 paragraf 1, subparagraph (c) (iv) yang dilakukan *di luar* batas teritorial negara peserta yang bersangkutan dengan pandangan/anggapan bahwa perbuatan tersebut dilakukan *di dalam* batas teritorial negara ybs. Kaidah hukum internasional tidak mengenal yurisdiksi sebagaimana disebutkan dalam artikel 4 butir b (3) diatas; akan tetapi kebiasaan dan praktek hukum internasional di bidang yurisdiksi kriminal mengenal dan mengakui tindakan perluasan yurisdiksi semacam itu. Penerapan secara teknis perluasan yurisdiksi teritorial suatu negara terhadap ancaman dan bahaya kejahatan narkoba sebagaimana ditegaskan di dalam artikel 4 butir b (3) diatas, adalah sejalan dengan *prinsip teritorial yang objektif (objective territorial principle)*. Prinsip teritorial ini diakui dalam kebiasaan dan praktek hukum internasional dan terbukti didalam putusan Mahkamah Tetap Internasional (Permanent Court of International Justice) pada tahun 1927 dikenal sebagai Kasus Lotus (Lotus Case). Sedangkan pada "The Geneva

Convention for the Suppression of Illicit Drug Traffic (1936)" telah dianut dan diakui *penerapan prinsip teritorial yang subjektif (subjective territorial principle).*

Perbedaan kedua prinsip penerapan perluasan yurisdiksi teritorial tersebut diatas adalah bahwa, prinsip teritorial yang subjektif memperluas yurisdiksi kriminal suatu negara terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam teritorial negara ybs (perencanaan, persiapan dan permulaan tindak pidana) akan tetapi penyelesaian tindak pidana tersebut terjadi di negara lain. Sedangkan prinsip teritorial yang objektif, memperluas yurisdiksi kriminal suatu negara terhadap tindak pidana yang dilakukan di negara lain (perencanaan, persiapan dan permulaan tindak pidana) akan tetapi diselesaikan di dalam teritorial negara ybs, akan mengakibatkan *kerugian-kerugian sosial dan ekonomis yang sangat besar di dalam teritorial negara ybs.* (Starke, 1984).

#### Kondisi objektif perangkat hukum pidana

Kondisi objektif perangkat hukum pidana yang berlaku dan Undang-Undang narkotika no. 9 Tahun 1976 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

a. bahwa sistem peraturan perundang-undangan, pidana juga peraturan perundang-undangan di bidang hukum keperdataan masih menganut asas kodifikasi. Asas ini hanya mengakui adanya satu kitab undang-undang sebagai Undang-Undang Induk yang berlaku bagi semua tindak pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur dan tersebar di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Asas ini di dalam kenyataannya kurang memberikan keleluasaan bergerak pada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk dapat segera mengantisipasi timbulnya setiap perkembangan modus operandi TPN yang mengancam kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang.

b. pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa eksistensi UU Narkotika no.9 Tahun 1976 dilandaskan pada isi ketentuan pasal 103 KUHP, hal mana tidaklah dapat dibenarkan mengingat masalah narkotika memerlukan pengaturan secara khusus baik pengaturan substransi maupun pengaturan acaranya.

Namun dalam perkembangan pembentukan hukum pidana nasional yang akan datang, nampak bahwa asas teritorial yang absolut sudah mulai ditinggalkan. Hal ini nampak pada isi ketentuan Bab I Pasal 4 ayat (4) yang mengatakan sebagai berikut :

"Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan di luar wilayah Republik Indonesia yang disebut dalam :

ayat (4) : pasal-pasal ..... (tindak pidana tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank, pembajakan, menyerahkan kendaraan air/udara kepada kekuasaan pembajak dan narkotika)".

Penjelasan terhadap pasal 4 tersebut diatas menyebutkan antara lain sebagai berikut :

bahwa pasal 4 ayat (4) menganut asas universalitas, yaitu asas yang melindungi kepentingan hukum yang merupakan bukan saja kepentingan hukum negara Indonesia, melainkan juga kepentingan universal. Pelanggaran atas kepentingan hukum universal disebut tindak pidana internasional. Landasan pengaturannya dalam konvensi internasional dimana sesuatu negara menjadi peserta.

Indonesia telah menjadi peserta dari beberapa konvensi internasional, antara lain, konvensi dan konvensi internasional tentang narkotika."

Memperhatikan pasal 4 ayat (4) diatas, ternyata penyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)-1987/1988, telah menganut prinsip perluasan asas teritorial yang objektif, sebagaimana halnya telah dilaksanakan dalam putusan Mahkamah Tetap Internasional dalam kasus Lotus (1927). Apabila dikaitkan dengan pasal 9 RKUHP atau pada pasal 9



KUHP yang menetapkan bahwa berlakunya pasal-pasal 2 s/d 8 dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional; maka rumusan isi ketentuan pasal 4 ayat (4) pada RKUHP mengandung pemikiran yang lebih modern di bandingkan dengan rumusan yang sama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang sekarang berlaku).

Bahkan menurut penjelasan pasal 9 RKUHP dikatakan antara lain :

"Negara Indonesia merupakan anggota masyarakat internasional. Oleh karena itu sudah selayaknya hukum Indonesia juga ikut serta menegakkan hukum internasional. Ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional yang diakui oleh Indonesia, maka hukum nasional Indonesia tidak diberlakukan. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional, maka berarti bahwa hukum nasional dibatasi oleh hukum internasional."

Sebagai akibat hukum dari bunyi ketentuan pasal 4 ayat (4) RKUHP tersebut diatas, terbukalah kemungkinan di masa yang akan datang bagi aparat penegak hukum untuk mengantisipasi dan melakukan penangkapan, penahanan dan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba (WNI atau WNA) di luar wilayah Indonesia yang menyelesaikan tindak pidana tersebut di dalam wilayah Indonesia atau mengakibatkan kerugian-kerugian sosial dan ekonomis yang sangat besar di dalam wilayah RI.

### KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan Hukum Nasional sesungguhnya merupakan pencerminan dari budaya suatu bangsa. Sehingga sering dikemukakan pendapat bahwa Hukum Nasional suatu bangsa dari satu negara kepada negara lain memiliki karakteristik sendiri dan khas, berbeda-beda satu sama lain. Selain terdapat perbedaan-perbedaan tidaklah dapat pula diabaikan adanya persamaan-persamaan

kepentingan hukum yang dipandang penting dan harus dilindungi diantara bangsa-bangsa dari pelbagai negara di dunia.

Salah satu kepentingan hukum yang dipandang penting dan wajib memperoleh prioritas dalam perlindungannya adalah hak untuk membela atau mempertahankan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka dan berkuasa penuh sebatas wilayah negara bangsa yang bersangkutan. Hak untuk menjadi bangsa yang merdeka dan memiliki suatu negara adalah merupakan hak asasi setiap bangsa di dunia. Pelanggaran atas wilayah suatu negara dengan alasan apapun juga adalah pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli dkk, "Aspek Hukum Masalah Tindak Pidana Internasional (Suatu Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika)", BPHN, 1991/1992.
- Bassiouni, Cheriff, "International Criminal Law"-Vol.1..... Crimes"; Transnational publishers, Inc, 1986.
- BP. Dharma Bhakti, Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA), 1999.
- Chatterjee, S.K., "Legal Aspect of International Drug ,....."
- Drs. Noegroho Djajoesman, Penyalahgunaan Narkoba, 1999.
- Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di DKI Jakarta, 2000.
- Direktorat Pembinaan Kesiswaan, Pedoman dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (P3N), Ditjen Dikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional, 1999.
- Direktorat Pembinaan Kesiswaan, Lingkungan Sekolah Bebas Narkoba, Ditjen Dikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Dadang Hawari, Penyalahgunaan Narkoba & Zat Adiktif, Balai Penerbit

- Fakultas Kedokteran Universitas  
Indonesia, 1991.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia,  
Yang Perlu Diketahui Generasi  
Muda Tentang Penyalahgunaan  
Obat, Jilid I, II, III Jakarta 1981,  
1982, 1984.
- Kusumaatmadja, Mochtar, "Bunga  
Rampai Hukum Laut"; BinaCipta,  
... 1978
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana,  
Apa Yang Perlu Anda Ketahui  
Tentang Ekstasi (XTC) 7, Dinas  
Kesehatan DKI Jakarta.
- Mhd. Reduan Aslie, TPP Mohd., "Krisis  
Dadah"; Malaysia AMK  
....Interaksi Sdn. Bhd., 1990.
- Soedarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana";  
Alumni, 1981. Starke, J.G. "Intro-  
duction to International Law"; Ninth  
Ed., Butterworth & Co., 1984.